

DITERBITKAN OLEH UKPM CIVITAS UNMER MALANG

MENGENAL INDUSTRI ROKOK MALANG RAYA



TABLOID TERUSAN DIENG CIVITAS EDISI 2026
Sejauh Apa Rokok Berpengaruh?



UNIT KEGIATAN PERS MAHASISWA CIVITAS
Basement III Keuangan dan Perbankan
Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No.57
Telp : 0895397691329
EMAIL : unmercivitas@gmail.com

**EDISI
2026
MARET**

PENGANTAR REDAKSI

SALAM PERS MAHASISWA!

Industri Hasil Tembakau (IHT) di Malang Raya kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama penerimaan negara. Sepanjang 2025, realisasi penerimaan KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Cukai Malang melampaui target, dengan capaian Rp30,4 triliun. Angka yang tidak hanya mencerminkan kekuatan fiskal, tetapi juga denyut ekonomi ribuan pekerja dan ratusan pabrik di daerah. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa tantangan, kenaikan tarif cukai, dinamika industri kecil, hingga ancaman rokok ilegal. Pandangan akademik dari Universitas Merdeka Malang mengingatkan pentingnya kebijakan fiskal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi secara menyeluruh.

Melalui edisi ini, Tabloid Terusan Dieng mengajak pembaca melihat industri tembakau secara menyeluruh, bukan hanya sebagai angka triliunan dalam laporan keuangan negara, tetapi juga sebagai sektor penting yang berada di tengah kepentingan fiskal, isu kesehatan, dan kesejahteraan para pekerja. Mari menelusuri setiap halaman Tabloid Terusan Dieng bersama kami!

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Rektor Universitas Merdeka Malang.

Penanggung Jawab : Pimpinan Umum UKPM.

Pembina : H. Rochmad Effendi B.H.Sc.M.si. **Pemimpin Umum :** Kevin Khayla Octova.

Pemimpin Redaksi : Fian Wahyu Firmansyah. **Redaksi Pelaksana :** Muhammad Daffa Nugraha.

Editor : Najma Awalita Rizkia F & Nova Velinda Fitri.

Sirkulasi : Redaksi Tabloid.

Layout : Muhamad Argi Ferdiansyah, Mochamad Naufal Dava Raffialy.

Redaksi : Ahman Ibadurrohman, Auliya Jaenatul Aini, Novia Rahmawati, Caecilia Pelita Andini, Nabila Putri Larasati, Wayan Putri Nisrina Arum, Mellysa Rahmadhani Saputri, Meylin Kana, Revita Ana Amelia, Zeta Ardeswara Putri, Nur Jingga Yuniar, Zul Amirul Haq, Oktaviana Natika Karisma Dara Ramadani, Avira Nayla Muriawan, Isabel Rosety Jacob, Fitriatul Islami Rifa, Dila Puspita Sari, Nur Azizah Salsabila, Delya Eunike Kristanti, Saskia Ade Novica, Wisnu Ilham, Ni Made Monica Averina, Aghita Clariza Aulia, Nadya Kirana Wibisovia

02

Pengantar
& Redaksi

04

Artikel Utama

14

Ilustrasi

03

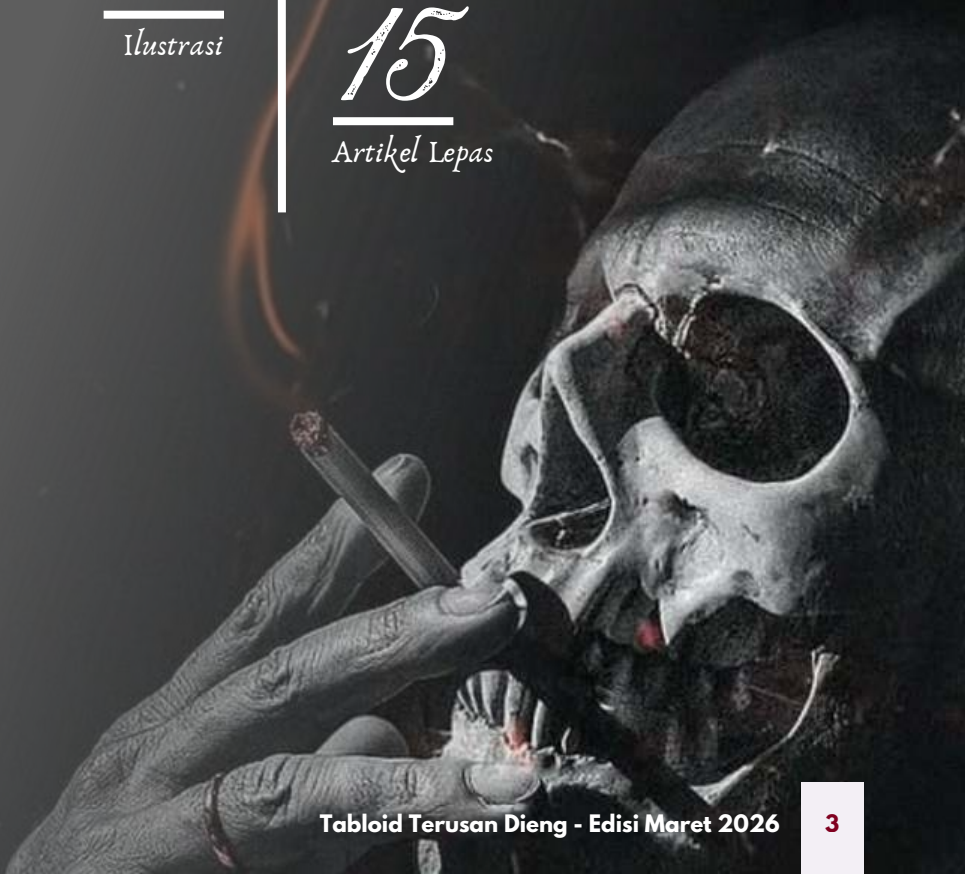
Daftar Isi

05

Fokus

15

Artikel Lepas



Artikel Utama

Mengenal Industri Rokok Malang Raya

“Di balik aroma tembakau yang menguar dari Malang Raya, terdapat industri padat karya yang menggerakkan roda ekonomi hingga triliunan rupiah.”



sumber gambar : id.pinterest.com

Sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) di wilayah Malang Raya kembali mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional sepanjang tahun 2025. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Malang mencatat realisasi penerimaan negara dari wilayah ini menembus angka Rp30,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 102,28 persen dari target awal, dengan sumbangsih terbesar berasal dari cukai hasil tembakau senilai Rp30,175 triliun. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi, mengungkapkan bahwa wilayah kerjanya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu memiliki karakteristik penerimaan yang unik. Meskipun secara nasional ada tiga komoditas utama kena cukai yakni etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan hasil tembakau namun di Malang Raya, sektor tembakau tetap menjadi penguasa pasar yang paling dominan.

“Target kita sebenarnya Rp29,7 triliun, namun realisasinya justru melampaui ekspektasi hingga Rp30,4 triliun. Ada surplus yang cukup signifikan tahun ini,” ujar Pitoyo selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang.

Seiring dengan performa keuangan yang positif, jumlah pelaku industri rokok di Malang Raya terus bertumbuh. Saat ini, tercatat ada 167 unit pabrik yang aktif beroperasi, dengan dua pabrik baru yang tengah merampungkan proses perizinan. Titik konsentrasi industri ini berada di Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Gondanglegi yang sejak lama dikenal sebagai basis produksi rokok skala kecil dan menengah. Kendati demikian, Pitoyo menegaskan bahwa izin pendirian pabrik tidak diberikan sembarangan. Setiap unit usaha wajib melalui verifikasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) serta uji laboratorium produk yang ketat demi menekan peredaran rokok ilegal.

Kontribusi industri ini tidak hanya masuk ke kas pusat, tetapi juga mengalir kembali ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada 2025, Kabupaten Malang menerima kucuran dana sebesar Rp151 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor vital, mulai dari perbaikan layanan kesehatan, pengawasan industri, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi sekitar 43.000 pekerja pabrik rokok dengan besaran Rp600.000 per orang. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan pabrik rokok memiliki dampak langsung terhadap jaring pengaman sosial di daerah penghasil.

Di balik angka triliunan tersebut, terdapat ekosistem padat karya yang melibatkan ratusan pabrik. CV Sayap Mas Nusantara, misalnya, mampu memproduksi lebih dari 1 juta batang rokok per hari atau sekitar 136 ribu bungkus. Perusahaan ini menyerap

Artikel Utama

sekitar pabrik. Sementara itu, pemain baru seperti CV Cakrawala Sentausa yang baru beroperasi sekitar tiga bulan di Gondanglegi, telah menunjukkan potensi besar dengan menyerap hampir 90 tenaga kerja. Kapasitas produksinya mencapai sekitar 8.100 bungkus per hari, mempertegas bahwa industri rokok baru terus bermunculan dan langsung mendapatkan tempat di pasar.

Dari sisi Akademik, Roby Nur Akbar, S.AB., M.AB., Ketua Program Studi Manajemen dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang, menjelaskan bahwa industri

rokok memiliki posisi vital dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional. Ia menyebut rokok sebagai “produk psikologis” yang memiliki karakteristik konsumsi unik di masyarakat. Menurut Roby, kebijakan kenaikan cukai yang tinggi memang dirancang untuk mengendalikan konsumsi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memicu tumbuhnya industri kecil yang belum tentu terkontrol dengan baik. Kondisi ini juga membuka peluang meningkatnya peredaran rokok ilegal apabila pengawasan tidak optimal.

Selain itu, terdapat ketimpangan modal dan jaringan bisnis antara perusahaan besar dan industri kecil. Karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat menyeluruh tanpa mempertimbangkan model usaha. Bagi industri kecil, strategi kemitraan dengan perusahaan besar dinilai lebih realistis untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tekanan regulasi dan isu kesehatan.



Penulis : Fian

Fokus

Asap Rokok dan Persoalan yang Mengikutinya

*"Di balik kepuluan asap yang tampak sepele,
tersimpan kisah tentang gaya hidup, remaja, dan persoalan cukai yang tak sederhana."*



Sumber gambar: respiratory-therapy.com

Bagi seorang perokok, sebatang rokok kerap menjadi pelarian kehidupan, sebuah penenang instan yang sejatinya merupakan hasil manipulasi nikotin terhadap sistem saraf. Namun, di balik ketenangan sesaat tersebut, tersembunyi ancaman serius bagi kesehatan, tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya.

Fenomena meningkatnya perilaku merokok di usia muda tercermin dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, tercatat sebanyak 3,68 persen penduduk berusia ≤ 18 tahun merupakan perokok tembakau. Rinciannya, 0,14 persen berasal dari kelompok usia 10–12 tahun, 1,77 persen usia 13–15 tahun, dan melonjak menjadi 9,29 persen pada kelompok usia 16–18 tahun. Data tersebut menandakan tingginya prevalensi merokok di kalangan remaja.

Realitas ini sejalan dengan pengakuan sejumlah narasumber di lapangan. Salah satunya M.A., mahasiswa semester tiga asal Malang, yang mengaku mulai merokok sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama.

"Saya mulai merokok kelas dua SMP. Awalnya coba-coba, lama-lama jadi kebiasaan," ujar M.A.

M.A. menuturkan bahwa faktor lingkungan dan pergaulan menjadi pemicu utama dirinya mengenal rokok.

"Waktu itu diajak teman-teman saat nongkrong. Awalnya hanya ikut-ikutan, lalu keterusan sampai sekarang," katanya.

Kebiasaan merokok sejak usia muda, ditambah keterbatasan finansial yang masih bergantung pada orang tua, membuat rokok lokal kerap menjadi pilihan utama bagi remaja.

Di Kota Malang, berbagai merek rokok lokal dijual dengan harga terjangkau dan mudah diakses. Tak hanya bagi remaja, rokok lokal juga menjadi alternatif bagi perokok aktif lainnya, terutama di tengah kenaikan harga rokok pabrikan besar.

Meski demikian, harga yang lebih murah belum tentu sebanding dengan kualitas. Rokok lokal masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seorang warga Malang berinisial S menilai produk dari pabrik kecil belum mampu menyaingi kualitas rokok pabrikan besar.

"Biasanya rokok lokal dari pabrik kecil kualitasnya belum stabil. Kadang terasa sakit di tenggorokan. Berbeda dengan rokok pabrikan besar yang proses seleksi kualitasnya lebih ketat," ujarnya.

Di tengah perdebatan tersebut, muncul persoalan lain yang lebih krusial, yakni peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai. Sejumlah narasumber menyebut rokok ilegal masih mudah ditemukan dan diperjualbelikan secara bebas di warung-warung kecil. Hal ini diungkapkan oleh R, warga Malang.

"Banyak di toko-toko Madura, contohnya seperti rokok S," ujarnya.



sumber gambar : id.pinterest.com



"Kalau kumpul sama teman-teman kampung, rokok yang beredar kebanyakan ilegal. Jadinya ikut terus merokok," katanya.

Pandangan tersebut berbanding terbalik dengan pendapat J, warga asli Malang lainnya. Menurutnya, rokok lokal memiliki karakter khas tersendiri. "Secara rasa, rokok pabrikasi besar memang lebih stabil, tapi rokok lokal juga punya ciri khas sendiri. Dari segi harga dan kualitas, rokok lokal justru lebih terjangkau," katanya.

Pengakuan serupa disampaikan oleh M.A. Menurutnya, rokok ilegal sangat mudah diperoleh, bahkan oleh remaja. Ia menyebut kebiasaan berkumpul pada malam hari turut memperbesar akses terhadap rokok tanpa pita cukai.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rokok ilegal masih nyata di tengah masyarakat Malang. Kondisi ini disayangkan karena rokok tanpa pita cukai dapat diakses tanpa batasan usia yang jelas. Selain meningkatkan risiko kesehatan, peredaran rokok ilegal juga berdampak serius terhadap perekonomian negara akibat hilangnya penerimaan dari sektor cukai.

Operasi Gabungan di Sidoarjo, 60 Ribu Batang Rokok Ilegal Dista

Baca Juga

Pemilihan di Sejumlah Titis Rokok

Dampak Rokok Bagi Kesehatan

ngopibareng.id/read/sinergi-aparat-selamatkan-rp-45-juta-potensi-kerugian-negara-dari-rokok-ilegal-di-sidoarjo

Situasi ini menimbulkan sorotan terhadap peran pemerintah dalam mengawasi peredaran rokok ilegal. Sejumlah narasumber menilai pengawasan di tingkat lapangan masih belum optimal, terutama di warung-warung kecil yang kerap menjadi titik penjualan rokok tanpa pita cukai. R menegaskan pentingnya peran aparat terkait dalam penegakan aturan.

"Kalau menurut saya, peran pemerintah dan Bea Cukai itu sangat penting, karena mereka punya tanggung jawab dalam pengawasan peredaran rokok agar sesuai aturan," ujarnya.

dengan perusahaan besar dinilai lebih realistis untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tekanan regulasi dan isu kesehatan.

Upaya penindakan dan sosialisasi dinilai perlu terus diperkuat guna menekan peredaran rokok ilegal agar tidak semakin meluas. Dampak rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerus pendapatan negara dan daerah. Hal ini terbukti dari penindakan yang dilakukan aparat Bea Cukai pada Senin, 12 Februari 2026, dengan menyita rokok ilegal yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp146.216.000.

Penindakan tersebut menjadi pengingat bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, terdapat ketimpangan modal dan jaringan bisnis antara perusahaan besar dan industri kecil. Karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat menyeluruh tanpa mempertimbangkan model usaha. Bagi industri kecil, strategi kemitraan

Fokus

Pandangan Akademisi: Menimbang Industri Rokok dan Kebijakan Cukai

"Industri rokok berdiri di wilayah abu-abu antara kesehatan dan ekonomi, di mana kebijakan negara kerap berbenturan dengan realitas sosial."



Di sepanjang jalanan Malang, kepulan asap rokok dari sudut-sudut warung kopi bukan sekedar pemandangan lewat begitu saja. Hal itu adalah napas pergaulan yang sulit dipisahkan dari keseharian warga. Bagi sebagian orang, rokok mungkin dianggap musuh kesehatan, namun bagi ribuan warga Malang Raya lainnya, terutama para ibu pelinting di pabrik-pabrik lokal, rokok adalah penyangga nyawa dan dapur yang terus mengepul. Redaksi Civitas berkesempatan berbincang hangat dengan Roby Nur Akbar, S.AB., M.AB., Ketua Program Studi Manajemen Universitas Merdeka Malang, yang memiliki pengalaman empiris selama satu setengah tahun sebagai supervisor di Gudang Garam sebelum berkarir sebagai akademisi.

Menurut Pak Roby, rokok merupakan "produk psikologis" yang permintaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi mental publik. Beliau mengisahkan pengalamannya saat di industri, meski kampanye bergambar bahaya merokok mulai masif diberlakukan. Angka penjualan hanya

mengalami guncangan sesaat shock buying sebelum akhirnya kembali melonjak. Logikanya sederhana namun getir: selama tingkat stres masyarakat masih tinggi, rokok akan tetap dicari sebagai pelarian instan. Hal ini membuktikan bahwa faktor psikologi konsumen jauh lebih kuat daripada sekedar larangan normatif.

Lebih dari itu, fenomena merokok sudah mendarah daging sebagai warisan budaya organik di berbagai pelosok Nusantara. Pak Roby menceritakan bahwa di daerah asalnya, Sumbawa, terdapat rokok lontar, sementara di Jawa dikenal sebagai rokok klobot yang dibuat sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan industri. Budaya ini menunjukkan bahwa merokok sudah menjadi kultur turun-temurun yang melampaui mekanisme ekonomi industri. Tanpa pabrik besar pun, masyarakat sudah terbiasa menanam tembakau dan melinting rokok sendiri. Oleh karena itu, memaksakan kebijakan anti-rokok yang terlalu ekstrem tanpa melihat kacamata antropologis dinilai hanya akan membentur tembok realitas sosial yang keras.

Beralih ke Sektor Ekonomi,

Malang Raya memegang posisi unik dalam peta industri tembakau nasional karena memiliki dua jalur produksi yaitu, untuk konsumen dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Produk rokok yang dibuat secara manual (linting tangan) justru menjadi primadona di pasar internasional, dan inilah yang memberikan dampak kesejahteraan paling nyata bagi masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja masif. Pak Roby menekankan bahwa ibu-ibu di pinggiran Malang banyak yang bergantung hidup sebagai buruh linting. "Kalau industri ini dihentikan tiba-tiba dengan dalih kesehatan tanpa ada alternatif substitusi lapangan kerja, siapa yang mau menanggung PHK massal ini?" tanyanya retorik, mengingat ekosistemnya yang membentang dari hulu hingga hilir ini terlalu masif untuk sekadar dipandang sebelah mata.



sumber gambar : id.pinterest.com

Namun, industri ini sekarang berada di persimpangan jalan akibat kebijakan cukai yang terus meroket demi menggenjot pendapatan negara. Pak Roby menilai negara terkadang bertindak kurang adil terhadap industri rokok; di satu sisi mereka adalah pembayar pajak yang paling patuh, namun di sisi lain terus ditekankan dengan regulasi yang disamaratakan tanpa melihat skala modal. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan antara perusahaan raksasa multinasional dengan pabrik lokal kecil ini sering kali memaksa pemain lokal untuk "bermain" di jalur ilegal tanpa pita cukai agar bisa bertahan hidup.

Menghadapi tantangan modal dan jaringan *network* yang terbatas di "samudera merah" persaingan bisnis tersebut, Pak Roby menyarankan strategi kemitraan sebagai langkah yang paling realistis. Di tengah tekanan aturan cukai yang berat, pilihan menjadi subkontraktor atau vendor bagi perusahaan besar dinilai lebih rasional dibanding membangun merek sendiri yang berisiko tinggi. Dengan pola *partnership production*, industri lokal di Malang tetap bisa menjalankan roda produksi dan menghidupi ribuan pekerjanya tanpa harus menanggung seluruh beban regulatif yang sering kali tidak berpihak pada mereka.

Sebagai penutup, Pak Roby berharap pemerintah dapat melahirkan "keadilan regulatif" dengan memahami model bisnis industri rokok secara holistik sebelum menaikkan kapasitas pengawasan. Harapannya, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai "penagih pajak" melalui Bea Cukai, tetapi juga berperan mendorong industri lokal agar bisa tumbuh dan naik kelas. "Pemerintah jangan berbisnis, biar masyarakat yang berbisnis. Tugas pemerintah adalah mengatur agar persaingannya sehat dan adil," pungkasnya, mengingatkan bahwa di balik tiap batang rokok, ada nasib ribuan rakyat kecil yang perlu dilindungi.

Fokus

Industri Rokok Lokal Malang di Tengah Dinamika Cukai dan Pengawasan

“Di balik stabilnya produksi dan penyerapan tenaga kerja, industri rokok lokal Malang bergerak di tengah tekanan regulasi dan beban cukai yang terus membesar.”



sumber : arsip civitas

Industri rokok masih menjadi salah satu sektor yang bertahan di Kabupaten Malang. Produksi berjalan setiap hari, tenaga kerja terserap, dan distribusi meluas hingga ke luar daerah. Namun, di balik aktivitas tersebut, kebijakan cukai dan pengawasan negara turut memengaruhi arah pergerakannya.

Di CV Sayap Mas Nusantara, aktivitas produksi berlangsung intens. CV Sayap Mas Nusantara memproduksi rokok jenis kretek dan filter dengan kapasitas lebih dari satu juta batang per hari atau sekitar 170 karton, dengan satu karton berisi 800 pack yang berarti kemungkinan produksi mencapai 136 ribu pack. Perusahaan ini menyerap kurang lebih 800 tenaga kerja, mayoritas berasal dari masyarakat sekitar.

Novi, Admin DC Perok CV Sayap Mas, menjelaskan bahwa sistem pengupahan menggunakan metode borongan. “Pelinting dihitung Rp45.000 per 1.000 batang. Untuk pengepakan Rp33.000 per bal, satu bal itu 200 pack,” ujar Novi saat diwawancarai. Menurutnya, pendapatan pekerja bergantung pada jumlah produksi masing-masing. “Semakin banyak yang bisa dikerjakan, tentu penghasilannya menyesuaikan.”

Dari sisi bahan baku, perusahaan memperoleh tembakau dari berbagai daerah seperti Temanggung, Besuki, dan Paiton. Bahan baku tidak langsung diproduksi, tetapi melalui proses seleksi kualitas.

Vika, Admin Gudang CV Sayap Mas, menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi dilakukan setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap. Tembakau yang datang akan diperiksa kadar air dan kualitasnya, lalu dijemur kembali jika diperlukan. Setelah itu dilakukan proses pencampuran dengan cengekhe sesuai formula perusahaan hingga menjadi TSG (tembakau siap giling). Setelah masuk tahap produksi, tembakau digiling dan dilinting, selanjutnya masuk ke bagian pengepakan. Dan siap di antar ke distributor.

Rokok kretek dipasarkan di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per pack. Untuk varian filter, harga berada di kisaran Rp15.000 sampai Rp17.000 per pack. Pihak perusahaan menyebut bahwa cukai menjadi komponen terbesar dalam struktur harga. Berdasarkan keterangan wawancara, cukai dihitung per batang mencapai sekitar 50–60% dari komponen harga tertentu. “Kalau dihitung total, cukai bisa lebih dari setengah komponen harga. Itu dihitung per batang,” ujar Vika.

Distribusi dilakukan ke berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Lampung, Sumatera, Bali. Persaingan di Malang yang cukup tinggi membuat perusahaan memperluas pasar ke luar daerah.

Sementara itu, CV Cakrawala Sentausa yang berlokasi di Gondanglegi Kulon merupakan perusahaan yang baru beroperasi sekitar tiga bulan. Meski tergolong baru, kapasitas produksinya telah mencapai sekitar 8.100 pack atau kurang lebih 130 ribu batang per hari. Komanditer perusahaan, Isa Kholili, mengatakan pihaknya tidak memulai tanpa persiapan pasar.



"Sebelum launching kita sudah punya pasar. Setelah izin keluar, kita langsung beri sampel ke daerah yang sesuai segmentasi kita," ujar Isa. Perusahaan saat ini memproduksi satu jenis rokok kretek isi 16 batang dengan harga ke konsumen sekitar Rp12.000 per pack, menyesuaikan biaya distribusi tiap daerah. Dari sekitar 65 tenaga giling, rata-rata produksi mencapai 2.000 batang per pekerja per hari. Total produksi diperkirakan 130.000 batang per hari atau sekitar 8.100 pack. "Alhamdulillah sudah stabil di angka segitu per hari," kata Isa.

Dalam tiga bulan, perusahaan menyerap hampir 90 pekerja, terdiri dari 65–70 tenaga giling, 15 tenaga packing, serta 11 tenaga administrasi dan pekerja pabrik. Mayoritas berasal dari masyarakat sekitar Gondanglegi, meski ada pula dari Sumbermanjing Wetan dan Bantur.

Upah dihitung berdasarkan jumlah produksi, sekitar Rp45.000 per 1.000 batang. "Tergantung perolehannya. Ada yang bisa 3.000 batang sehari, ada yang masih belajar 1.000," jelas Isa.

Distribusi difokuskan ke luar daerah, seperti Jawa Tengah, Cirebon, Banyuwangi, dan Mataram. Wilayah perkebunan dan perhutanan dinilai menjadi pasar potensial. "Ketika bekerja jauh dari kota, belinya langsung banyak," ujarnya.

Bahan baku tembakau diperoleh dari beberapa daerah, antara lain Wonogiri, Probolinggo, dan Situbondo, dengan sistem campuran dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai industri hasil tembakau, perusahaan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perhitungan cukai didasarkan pada harga per keping pita cukai dikalikan isi 16 batang per bungkus, ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE) pada pita cukai, bukan harga jual riil di pasar.

"Kalau kita jual 10 ribu, dasar pengenaan pajaknya 13.700. Jadi hampir 4 ribu kita belum jual itu sudah rugi segitu," tegas Isa. Menurutnya, sistem tersebut memberatkan pelaku industri karena pajak ditarik dari harga yang lebih tinggi dibanding harga jual sebenarnya.

"Kami merasa sebagai industri rokok itu keberatan dengan dasar pengenaan pajaknya dari harga pita. Seharusnya dari harga jualnya," tambahnya. Meski demikian, perusahaan mengaku belum mengalami kenaikan cukai karena masih dalam tiga bulan awal operasional dan belum berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak). Namun antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan tetap menjadi perhatian manajemen. "Tahun ini kan tidak ada kenaikan. Tapi itu sudah menjadi antisipasi kita," ujarnya.

Meski demikian, kedua perusahaan optimis terhadap masa depan industri rokok di Malang. Mereka berharap kebijakan pemerintah, khususnya terkait dasar pengenaan pajak dan regulasi pita cukai, dapat lebih mempertimbangkan kondisi pelaku industri lokal.

Industri rokok di Malang bukan sekadar soal konsumsi, tetapi juga menyangkut mata pencaharian ratusan hingga ribuan pekerja. Di tengah regulasi yang ketat dan dinamika pasar, industri ini terus beradaptasi. Pertanyaannya kini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana industri lokal dapat berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan kebijakan yang terus berubah.

Fokus

Rokok Malang di Persimpangan

“Cukai menjadikan rokok sebagai sumber penerimaan negara yang besar, namun di saat yang sama, kesehatan publik dan ketergantungan ekonomi terus menjadi dilema.”



sumber : arsip civitas

Malang Raya selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan industri rokok yang cukup dominan di Jawa Timur. Di balik aktivitas produksi tersebut, terdapat peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mengawasi sekaligus memungut cukai dari hasil tembakau.

Dalam wawancara bersama tim CIVITAS, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi, menjelaskan bahwa Bea Cukai memiliki empat fungsi utama: sebagai pengumpul penerimaan negara, pelindung masyarakat, pendamping industri, dan fasilitator perdagangan. Namun di Malang, sektor cukai terutama rokok menjadi yang paling dominan.

Menurut data yang disampaikan narasumber, target penerimaan tahun 2025 sebesar Rp29,7 triliun dengan realisasi mencapai Rp30,4 triliun atau sekitar 102,28%. Dari angka tersebut, penerimaan cukai disebut mencapai sekitar Rp30,175 triliun. Pitoyo juga mengungkapkan bahwa jumlah pabrik rokok di wilayah Malang Raya terakhir tercatat sekitar 167 pabrik, dengan tambahan dua pabrik baru dalam proses.

Menariknya, Malang bukan daerah penghasil tembakau utama, tetapi jumlah pabrik rokoknya cukup banyak. Industri ini dinilai mampu menggerakkan sektor lain seperti percetakan etiket, distribusi, hingga usaha kecil di sekitar pabrik. “Kalau ada pabrik rokok, biasanya ekonomi sekitar ikut bergerak,” ujar Pitoyo menjelaskan.

Namun, beban fiskal pada rokok sangat besar. Berdasarkan penjelasan narasumber, sekitar 60–70% struktur harga rokok merupakan komponen pajak dan cukai. Selain cukai, terdapat Bea dan Pajak sebesar 9,1% dan pajak rokok 10% untuk pemerintah daerah.

Sebagian penerimaan tersebut dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Untuk Kabupaten Malang, menurut data yang dipaparkan narasumber, DBH tahun 2025 sekitar Rp151 miliar dengan tambahan sisa anggaran sebelumnya sekitar Rp30 miliar. Dana ini digunakan antara lain untuk layanan kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja pabrik rokok, serta penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

Di Sisi Lain,

rokok dikategorikan sebagai barang dengan eksternalitas negatif atau berdampak pada kesehatan. Narasumber menyebut cukai sebagai bentuk pengendalian sekaligus kompensasi atas dampak tersebut. Kenaikan harga melalui cukai diharapkan dapat membatasi konsumsi, khususnya pada anak-anak.



rspp.co.id/artikel-detail-472-Asap-Rokok-Bahaya-Tersembunyi-di-Balik-Kepulan-Putih.html

Meski demikian, dilema muncul ketika kebijakan pengendalian konsumsi berdampak pada penerimaan negara dan keberlangsungan tenaga kerja. "Kalau industrinya ditutup, industri apa yang bisa menampung tenaga kerja sebanyak itu?" ujar Pitoyo dalam wawancara.

Persoalan lain yang diangkat adalah peredaran rokok ilegal. Berdasarkan kajian akademik yang disebut narasumber, peredaran rokok ilegal diperkirakan sekitar 3% dari total nasional. Bea Cukai mengaku mengedepankan pendekatan persuasif dengan mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin resmi agar lebih mudah diawasi.

Industri rokok di Malang pada akhirnya berada di persimpangan antara kepentingan fiskal, kesehatan publik, dan ketergantungan ekonomi daerah. Sebagai mahasiswa, pertanyaan yang tersisa bukan hanya soal berapa besar penerimaan negara, tetapi juga bagaimana masa depan ekonomi Malang jika terlalu bergantung pada satu sektor industri.

Penulis : Ainun, Nadya, dan Arum

Editor : Nova & Najma



Ilustrator : Nova

Artikel Lepas

Sumatra's Living Hell

"Ketika bencana datang, alam sering dijadikan kambing hitam, padahal jejak kerusakan kerap mengarah pada tangan manusia itu sendiri."



um-surabaya.ac.id/en/article/pakar-umsurabaya-bencana-sumatera-bukan-semata-fenomena-alam-tetapi-gagalnya-lata-kelola-lingkungan

Pada tahun 2026 menjadi tahun yang menciptakan bekas luka baru bagi kita, terlebih masyarakat Sumatra. Palsanya, terjadinya sebuah bencana banjir besar dan longsor di Sumatra yang menyebabkan banyak korban, baik secara fisik maupun batin dengan trauma yang mendalam. Banyak masyarakat berargumen bahwa bencana ini adalah ulah manusia itu sendiri khususnya pemerintah, yang menyebabkan kerusakan fisik pada alam dan menimbulkan musibah. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa ini memang sebuah fenomena alam yang ekstrem, dan terjadi di banyak wilayah dan negara lain tidak hanya di Indonesia. Banyak opini-opini yang timbul atas bencana yang terjadi, menggambarkan kebebasan berpendapat dan liarnya cara kita berekspresi.

Pada tanggal 25 November 2025 hujan mengguyur deras di wilayah Sumatera Utara. Akibat perubahan cuaca yang ekstrem ini menyebabkan kerusakan fisik dengan cepat. Menurut Kompas TV, total korban meninggal dunia mencapai 1.204 dengan 140 orang masih dinyatakan hilang. Sebab awal terjadi akibat adanya fenomena atmosfer dan bibit siklon di Samudra Hindia yang memicu hujan dengan intensitas lebat dalam durasi lama. Akibat Fenomena tersebut jumlah volume air yang turun menjadi sangat banyak, dan ditambah dengan kondisi alam yang sudah rusak. Artikel CNBC mengatakan kerusakan terjadi dikarenakan aktivitas tambang ilegal yang ada di wilayah tersebut. Menurut National Geographic Indonesia, ini terjadi akibat banyaknya penggundulan hutan dan pengrusakan habitat alami hewan yang menyebabkan alam tidak bias bekerja dengan baik saat fenomena siklon tropis koto dan bibit siklon 95B yang membawa hujan ekstrem ke Sumatera bagian utara dan tengah.

Ditengah perdebatan tentang "dalang" dari musibah tersebut, muncul isu baru tentang "mengapa" bencana Sumatra tidak ditetapkan menjadi "Bencana Nasional"?. Di media sosial banyak masyarakat mendesak untuk menjadikan musibah Sumatra menjadi Bencana nasional dikarenakan APBN tidak akan turun, apabila bukan bencana nasional. Faktanya APBN tetap bias turun, meskipun bukan dinyatakan Bencana nasional. Indonesia punya dana siap pakai dari BNPB dengan syarat, status tanggap darurat dari bupati atau gubernur. Saat status itu keluar atau gubernur. Saat status itu keluar dana akan langsung cair. Purbaya selaku menteri keuangan menyiapkan dana sebesar 500 Miliar dan akan ditambah apabila dana tersebut kurang (jawapos.com). Pada dasarnya maupun ditetapkan atau tidaknya bencana nasional pada Sumatra, musibah seperti ini bias saja akan terulang lagi apabila kita "cuek" pada akar masalah yang terjadi. Usut pembalakan liar, deforestasi yang dibiarkan hingga para mafia kayu, dan pastikan pemulihan lingkungan benar benar berjalan. Hujan hanya pemicu, yang benar-benar "dalang" dari musibah ini adalah mereka yang merusak alam.

Penulis : Ibad

SCAN KODE QR INI



**UNTUK KUNJUNGI
WEBSITE KAMI**



mediacivitas.web.id

@mediacivitas

